

ANALISIS DAMPAK *MILITARY CIVIL FUSION* CHINA TERHADAP STABILITAS REGIONAL KAWASAN ASIA TIMUR

Muh Ariiq Fatahurrasyidin Khasnah¹, Wira Atman²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Juni 2025

Revised: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹ariiqmuhammad14@gmail.com

²wiraatman@unhas.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

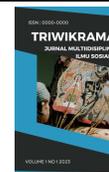
Military Civil Fusion yang diterapkan oleh China merupakan strategi yang mengintegrasikan kemampuan militer dan sipil dengan tujuan meningkatkan kekuatan nasional. Dampak MCF Tiongkok terhadap stabilitas regional di kawasan Asia Timur menjadi fokus utama Artikel ini. *Military Civil Fusion* merupakan strategi yang mengintegrasikan sumber daya militer dan sipil untuk meningkatkan kekuatan nasional. Melalui metode analisis kebijakan dan kajian literatur menggunakan metode kualitatif, artikel ini menjelaskan bahwa *Military Civil Fusion* dapat meningkatkan ketegangan regional, yang mengarah pada kekhawatiran akan dominasi militer yang dapat memicu perlombaan senjata atau *arms race*. China, dengan teknologi dan inovasi yang berkembang, berpotensi memperburuk pola konflik dan memberikan tekanan geopolitik di Asia Timur. Kekhawatiran akan ekspansi militer Tiongkok dapat memicu perlombaan senjata dan menciptakan ketidakpastian dalam geopolitik kawasan. Artikel ini menekankan perlunya dialog dan kerjasama internasional untuk mengelola dinamika yang dihasilkan oleh *Military Civil Fusion*, demi menjaga stabilitas regional dan mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, setelah memahami konsep *Military Civil Fusion* secara utuh serta dampak yang mungkin ditimbulkan, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur, baik bagi para akademisi maupun para pembuat kebijakan dalam menghadapi serta menyikapi fenomena ini.

Kata kunci: *Military Civil Fusion*, China, stabilitas regional, Asia Timur.

Abstract

Military-Civil Fusion implemented by China is a strategy that integrates military and civilian capabilities with the aim of increasing national power. The impact of China's MCF on regional stability in East Asia is the main focus of this article. Military Civil Fusion is a strategy that integrates military and civilian resources to increase national power. Through policy analysis methods and literature reviews using qualitative methods, this article explains that Military Civil Fusion can increase regional tensions, leading to concerns about military dominance that can trigger an arms race. China, with its developing technology and innovation, has the potential to worsen conflict patterns and put geopolitical pressure on East Asia. Concerns about China's military expansion can trigger an arms race and create uncertainty in regional geopolitics. This article emphasizes the need for international dialogue and cooperation to manage the dynamics generated by Military Civil Fusion, in order to maintain regional stability and reduce the potential for conflict. Thus, after understanding the concept of Military Civil Fusion as a whole and the impacts that may arise, this article is expected to be a source of literature, both for academics and policy makers in facing and responding to this phenomenon.

Keywords: *Military Civil Fusion*, China, regional stability, East Asia.

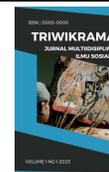


PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kompleksitas di Kawasan Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat seiring dengan terus berkembangnya kompetisi antar kekuatan-kekuatan besar, terutama persaingan dalam pengembangan teknologi untuk tujuan militer. Salah satu bentuk pengembangan teknologi yang bertujuan untuk pengembangan teknologi untuk tujuan militer dapat dilihat dari kebijakan strategis yang diambil oleh China yakni *Military Civil Fusion* (MCF) yang telah diterapkan dalam beberapa tahun belakangan. *Military Civil Fusion* mencakup integrasi tanpa batas antara teknologi, bakat, dan sumber daya terkait pertahanan ke dalam industri sipil dan sebaliknya. Integrasi ini difasilitasi oleh kebijakan yang mempromosikan penggunaan ganda teknologi, yang mendorong kolaborasi antara sektor pertahanan dan sipil, serta mendorong inovasi dan transfer pengetahuan. Hal ini sesuai dengan penyampaian dari Presiden China, "*Military Civil Fusion* sebagai strategi utama untuk mewujudkan tujuan Partai Komunis Tiongkok untuk membangun militer yang kuat di era baru" (Jinping, 2017). Walaupun jika ditinjau dari aspek sejarah, *Military Civil Fusion* bukan merupakan kebijakan yang baru, kebijakan telah menjadi inisiatif China sejak awal 1980-an yang terus mengalami perubahan dan perkembangan, yang awalnya dikenal dengan nama *Military Civil Integration* yang merupakan Konsep awal *Military Civil Fusion* sejak era kepemimpinan Mao Zedong, yang bertujuan untuk memaksa bagian komersil dan sipil dari masyarakat China untuk mendukung *People's Liberation Army* (Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok) hingga dikenal dengan *Military Civil Fusion* yang disahkan pada tahun 2015 dalam Undang-Undang keamanan nasional China. Perubahan kebijakan ini didorong oleh pergeseran dinamika global yang terus mendorong peran persaingan strategis sebagai kunci dalam penentuan ekonomi dan pertahanan. Strategi ini menjadi cerminan keinginan untuk mengurangi kelemahan dan ketergantungan terhadap dunia internasional, utamanya persaingan dengan Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China telah memprioritaskan integrasi sumber daya militer dan sipil untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan merangsang pembangunan ekonomi (Chung, 2020). Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong integrasi antara sektor militer dan sipil yang diterapkan melalui kebijakan intensif, seperti peningkatan anggaran untuk penelitian dan pengembangan, dan pembentukan kerjasama strategis antar pemerintah dan perusahaan sipil. China secara aktif memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan teknologi untuk berkolaborasi dengan militer guna mengoptimalkan penerapan ilmu dan teknologi.

Dalam konteks kawasan Asia Timur, kebijakan ini menimbulkan sejumlah kecemasan dan tantangan untuk stabilitas regional. Negara-negara yang berada di dekat China seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan ini. Negara-negara tersebut menilai implementasi penggunaan teknologi sipil untuk keperluan militer dapat memicu perlombaan senjata dan memicu ketegangan antar negara. Selain itu, kebijakan ini dinilai dapat merusak keseimbangan yang terjalin, yang dapat meningkatkan resiko konflik, dan mengganggu kestabilan geopolitik kawasan. Hal ini menimbulkan reaksi bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk memperkuat aliansi dan meningkatkan perkembangan teknologi semikonduktor yang berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas militer mereka. Selain berdampak ke aspek pertahanan, *Military Civil Fusion* juga berdampak terhadap laju ekonomi dan persaingan teknologi maritim di Asia Timur. Hal ini sesuai dengan laporan *Indo-Pacific Defense Forum* (2025), dengan penguatan teknologi maritim China melalui *Military Civil Fusion*, memicu munculnya persaingan akses dan kontrol jalur pelayaran sehingga alur untuk ekspor dan impor dapat terancam. Hal ini memicu situasi sulit bagi negara-negara tetangga yang berada di sekitar akibat timbulnya rasa ancaman karena meningkatnya kemampuan China dalam memproyeksikan kekuatan di Laut China Timur dan



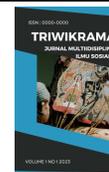
Laut China Selatan. Rasa ancaman ini timbul akibat berkembangnya perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan militer China seperti pengembangan teknologi *Chip* oleh perusahaan China yakni *Changsha Jingjia Microelectronics* untuk kartu grafis (GPU) yang digunakan pada radar dan satelit dan perusahaan lain seperti *Cambricon Technologies* salah satu pengembang *hardware* khusus terkemuka di Tiongkok untuk aplikasi AI (*Artificial Intelligence*), yang memiliki tujuan khusus untuk mencapai dominasi teknologi dan melampaui Amerika Serikat dalam upaya modernisasi militer.

Secara lanjut, kebijakan *Military Civil Fusion* China yang didukung dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan militer, secara tidak langsung dapat berimplikasi terhadap stabilitas kawasan Asia Timur, baik meningkatkan kemampuan militer dan posisi geopolitik China maupun potensi untuk menimbulkan ketidakpastian dan konflik yang dapat merusak kestabilan regional. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih baik terhadap resiko dan peluang yang dihadirkan terhadap keamanan regional dan kestabilan kawasan, serta menentukan langkah-langkah efektif dalam menghadapi perubahan yang ditimbulkan dari kebijakan *Military Civil Fusion*.

KAJIAN TEORITIS

Dampak strategi *Military Civil Fusion* dapat dianalisis melalui kerangka teori geopolitik, yang menitikberatkan pada ketegangan kekuatan, distribusi kekuasaan, dan kompetisi regional (Mackinder, 1904). Teori geopolitik menegaskan bahwa negara yang berusaha memperkuat kekuatan militernya melalui modernisasi secara cepat cenderung bersiap untuk mengubah *landscape* kekuatan regional dan global, yang dapat menimbulkan ketegangan serta konflik (Mackinder, 1904). Dalam teorinya yang dikenal dengan nama *Heartland*, Halford J. Mackinder berpendapat bahwa kontrol atas wilayah strategis dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan global, dan dalam kasus di kawasan Asia Timur, China berusaha mencapai pencapaian yang unggul melalui pengembangan teknologi dan kemampuan militer. Secara lanjut, peningkatan kekuatan militer China, terutama melalui strategi *Military Civil Fusion* yang mempercepat integrasi teknologi militer dan sipil, secara mendasar dapat mengubah pembagian kekuatan regional dan mempertegas daya tarik China sebagai sebuah kekuatan besar, sekaligus memunculkan kekhawatiran akan perlombaan senjata atau *arms race* dan menimbulkan ketidakstabilan regional.

Beberapa ahli sebelumnya memaparkan bahwa strategi ini telah memperkuat posisi geopolitik China dan menantang posisi negara tetangga serta kekuatan besar lainnya di kawasan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Timothy R. Heath (2024) berpendapat bahwa: “Strategi integrasi ini tidak hanya berdampak pada kemampuan pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam negosiasi geopolitik. Dengan mengoptimalkan transfer teknologi dan mengintegrasikan kapabilitas inovatif, negara dapat memperluas kehadirannya di wilayah strategis tertentu dan mengubah dinamika persaingan kekuasaan global”. Pendapat ini menjelaskan bahwa perkembangan militer China dapat memicu perlombaan kekuatan dan meningkatkan resiko ketegangan regional. Para ahli lain, seperti Alessio Pattalano (2024) menambahkan perspektif lain dengan mengaitkan *Military Civil Fusion* dengan aspek keamanan maritim dan ekspansi regional. Menurutnya penerapan *Military Civil Fusion* memungkinkan China untuk meningkatkan kapabilitas armada lautnya melalui pengembangan teknologi satelit, kecerdasan buatan, dan sistem sensor canggih yang memantau pergerakan kapal di perairan strategis. Pattalano (2024) juga menekankan bahwa selain aspek teknologi, sinergi antara sektor sipil dan militer memungkinkan terciptanya strategi dukungan logistik yang lebih efisien, yang penting untuk operasi militer maritim dan pengamanan jalur perdagangan. Hal ini semakin menegaskan kaitan antara strategi *Military Civil Fusion* dan penguasaan wilayah strategis yang



tidak hanya bertujuan memperkuat pertahanan, tetapi juga memperluas cakupan pengaruh geopolitik Cina di Asia Timur.

Pendapat para ahli ini sejalan dengan pandangan Mackinder, yang menjelaskan bahwa pergeseran distribusi kekuasaan regional dapat berdampak pada keseimbangan dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola secara lanjut (Mackinder, 1900). Dalam konteks regional Asia Timur, kekuatan China yang diperkuat dengan *Military Civil Fusion* berpotensi menciptakan ketidakpastian dan beresiko menciptakan konflik apabila negara lain meresponsnya secara agresif. Walaupun jika dikaji lebih lanjut, tidak ada hipotesis eksplisit yang mendukung, tetapi kajian ini mendukung pendapat bahwa peningkatan kekuatan militer China dapat mempengaruhi stabilitas dan keseimbangan regional secara signifikan, dan dinamika ini perlu diwaspadai dan dikaji untuk mencegah ketidakstabilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori geopolitik menyediakan landasan penting untuk memahami bagaimana strategi perkembangan inisiatif China dalam militerisasi dapat mempengaruhi tatanan keamanan regional di kawasan Asia Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai kebijakan *Military Civil Fusion* yang diterapkan oleh China dan implikasinya terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Yang dimana, Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara komprehensif dan analitis berdasarkan konteks historis, politik, dan strategis yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan kebijakan, serta pernyataan dari aktor-aktor terkait, baik dari China itu sendiri, maupun negara-negara di kawasan Asia Timur, dan Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Heartland* yang dikembangkan oleh Halford J. Mackinder. Teori ini menjadi alat bantu utama dalam memahami persepsi dan tujuan dari *Military Civil Fusion*, persepsi yang ditimbulkan oleh strategi ini, serta strategi untuk menjaga stabilitas di kawasan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi empat variabel utama dari teori ini: kekuatan militer, kontrol wilayah strategis, penguasaan teknologi, dan stabilitas regional. Seluruh data dan informasi dianalisis secara interpretatif untuk menyusun pemahaman yang koheren mengenai bagaimana kebijakan *Military Civil Fusion* menjadi sebuah langkah China yang dapat mengancam stabilitas kawasan Asia Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Implementasi Strategi *Military Civil Fusion* Terhadap Perkembangan Teknologi Militer China

Strategi *Military Civil Fusion* yang dihadirkan oleh China secara signifikan telah mendorong percepatan teknologi militernya. Dengan menggabungkan teknologi sipil dan militer, China berhasil mengalihkan teknologi komersilnya ke dalam militer dengan efisien. Langkah ini memberikan China keunggulan kompetitif, khususnya mempercepat teknologi yang bermanfaat bagi militer seperti *Artificial Intelligence* (AI), *drone* militer, dan sistem rudal supersonik. Selain itu, dari penerapan ini memberikan peluang bagi perusahaan teknologi sipil untuk berkontribusi secara langsung terhadap inovasi teknologi pertahanan. Sebagai contoh, perusahaan semikonduktor seperti *Semiconductor Manufacturing International Corporation* (SMIC) yang merupakan perusahaan semikonduktor terbaik milik China dan *Jingjia Micro*, membuat kemampuan China merancang dan memproduksi *microchip* di dalam negeri untuk fasilitas militer berkembang pesat, sehingga dapat digunakan untuk mengganti penggunaan *Microchip* asing secara keseluruhan. Sebelum pengembangan *microchip* untuk GPU, pesawat

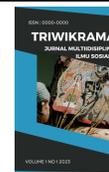
nirawak dan pesawat militer China secara keseluruhan mengandalkan GPU M9 yang diproduksi oleh ATI, perusahaan Kanada yang dimiliki oleh *Advanced Micro Devices* (AMD) yang berkantor di Amerika Serikat. GPU M9 awalnya dikembangkan pada tahun 2002, dan Jingjia baru mampu menyamai kinerjanya pada tahun 2018. Walaupun terbilang cukup lama untuk menyamai teknologi GPU Amerika Serikat, berkat gabungan SMIC dan *Jingjia*, kemampuan Tiongkok untuk merancang dan memproduksi GPU di dalam negeri untuk penggunaan militer guna menggantikan sepenuhnya *chip* asing dinilai sangat membantu perkembangan teknologi militer China. Selain *Jingjia Micro*, perusahaan lain seperti *Cambricon Technologies* menjadi contoh lainnya dari keberhasilan penerapan *Military Civil Fusion* ini. Sebagai salah satu pengembang *hardware* khusus terkemuka di Tiongkok untuk aplikasi AI (*Artificial Intelligence*), *Cambricon* mendapat manfaat yang cukup besar dari kontrak kebijakan oleh pemerintah China.

Pengembangan teknologi maritim juga menjadi prioritas yang tak kalah penting dalam kebijakan *Military Civil Fusion*. Hal ini terlihat pada pengarahannya China terhadap Badan Usaha Milik Negeranya (BUMN) yang bergerak di produksi kapal sipil seperti *China State Shipbuilding Corp.* dan *China Shipbuilding Industry Corp.*, agar mulai bekerjasama untuk membuat kapal militer canggih (*Indo-Pasific Defense Forum*, 2025). Teknologi yang dikembangkan untuk struktur kapal sipil, seperti konstruksi modular dan material yang canggih, diimplementasikan ke dalam desain militer untuk meningkatkan kemampuan menghindari deteksi radar dari kapal musuh serta peningkatan efektifitas dan kinerja. Seperti pada kapal perusak kelas Renhai Tipe 055 PLAN, yang merupakan salah satu kapal perang terbesar dan terancang milik China telah mendapatkan inovasi desain dan bentuk konstruksi dari kapal sipil. Selain itu pengembangan penginderaan jarak jauh dengan bantuan AI semakin memperkuat kapabilitas pengawasan dan pengendalian wilayah, utamanya di bagian yang rentan seperti Laut China Timur.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang selalu memberikan fleksibilitas bagi militer untuk mengakses teknologi baru yang sudah dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan universitas sipil yang berafiliasi dengan militer China. Dengan semakin matangnya penerapan *Military Civil Fusion* ini, China telah berhasil mengembangkan teknologi militer yang sesuai dengan era saat ini yang berbasis teknologi tingkat tinggi, yang membuat perkembangan ini menjadi perhatian serius bagi negara-negara di kawasan. Melihat kekuatan militer dan perkembangan teknologi China dalam beberapa tahun belakangan semakin dominan dan beresiko memunculkan dominasi militer dan perlombaan senjata di kawasan.

2. Dampak *Military Civil Fusion* terhadap Geopolitik Kawasan

Penerapan kebijakan *Military Civil Fusion* telah memberikan perubahan signifikan terhadap dinamika geopolitik dan di kawasan Asia Timur. Dengan memperkuat kapabilitas militernya, China semakin jelas memperlihatkan keinginannya dalam klaim teritorial dan pengaruh regional. Berdasarkan teori geopolitik Halford J. Mackinder yakni *Heartland*, kontrol dalam suatu wilayah strategis dapat memberikan dampak pada dominasi kekuatan global (Mackinder, 1904). Dalam konteks Asia Timur, Laut China Timur dan Laut China Selatan menjadi wilayah strategis yang diperebutkan. Melalui kemampuan militer yang didukung oleh *Military Civil Fusion*, China berupaya menguasai wilayah strategis (*Heartland*) ini sebagai pengendali utama jalur perdagangan dan keamanan regional. Dari upaya untuk menguasai wilayah strategis tersebut dengan kekuatan militernya, membentuk perubahan pada pola interaksi diplomatik. Negara-negara Asia Timur, khususnya negara-negara yang berafiliasi kuat dengan Amerika Serikat, semakin memberikan batasan terhadap pembangunan hubungan bilateral dengan China. Hal ini merupakan upaya dan respon defensif dari negara-negara tersebut terhadap kebangkitan militer China untuk tetap menjaga keseimbangan kekuatan yang dinamis di kawasan Asia Timur.



Selain itu, kebijakan *Military Civil Fusion* juga memperkeruh kompleksnya hubungan regional, karena sektor sipil yang dikhususkan untuk sipil seperti perusahaan teknologi kini menjadi bagian dari rencana pertahanan negara. Hal ini memberikan kekhawatiran negara lain terhadap transparansi dan bentuk keinginan strategis China, utamanya mengenai ekspansi ekonomi dan proyek infrastruktur lintas batas. Pengaruh lain seperti meningkatnya aktivitas militer China di wilayah strategis, yang semakin meningkatkan resiko munculnya konflik. Hal ini semakin mempertegas teori Mackinder, yang di mana dengan penguasaan atas wilayah strategis menjadi kunci untuk mempertahankan hegemoni regional. Imbas dari fenomena ini menimbulkan efek difusi keamanan, dimana negara-negara sekitar terdorong untuk mempercepat modernisasi militer negaranya, hal ini merupakan sebuah respon lanjut terhadap bangkit dan semakin berkembangnya militer China, yang berpotensi meningkatkan intensitas perlombaan senjata di kawasan.

Secara keseluruhan, kebijakan *Military Civil Fusion* tidak hanya memberikan dampak terhadap keseimbangan kekuatan militer, tetapi juga memberikan dampak sistematis terhadap hubungan geopolitik di Asia Timur.

3. Respon Sekutu Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur : Penguatan Kapabilitas Militer di Laut China Timur

Menghadapi perkembangan pesat teknologi dan militer China melalui kebijakan *Military Civil Fusion*, negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah meningkatkan investasi dalam rangka penguatan stabilitas militer di Laut China Timur. Tujuan utama negara-negara tersebut adalah meningkatkan daya saing teknologi militer yang berbasis pada modernisasi sistem tempur sekaligus meningkatkan pertahanan dalam aspek maritim. Selain itu, negara-negara sekutu dan Amerika Serikat memperkuat keamanan dengan modernisasi teknologi militer yang memiliki keunggulan tinggi yang dirancang dengan tujuan mengimbangi kekuatan militer China di wilayah maritim yang menjadi wilayah strategis (*Indo-Pasific Defence Forum, 2025*). Hal ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas jalur pelayaran dunia Asia Timur.

Imbas kebijakan *Military Civil Fusion* ini, membuat negara-negara yang sering berkonflik dengan China diakibatkan klaim wilayah, melakukan penguatan kapabilitas militer mereka dengan meningkatkan teknologi, dengan melakukan kolaborasi dalam produksi komponen semikonduktor yang akan digunakan dalam teknologi alutsista mereka seperti *drone*, pesawat tanpa awak, dan lain sebagainya. Jepang sebagai contohnya, mereka mulai mempercepat program modernisasi angkatan laut dan angkatan udara mereka, yakni melakukan pengembangan rudal pada dua kapal perang permukaan terbesar di Asia. Menurut *US Naval Institute News*, Jepang mengembangkan kapal perusak yang tidak disebutkan namanya dengan dipersenjatai penecat rudal SM-3 Blok IIA, sistem tempur *egis*, dan radar yang memiliki berat 20.000 ton, dengan panjang 690 kaki dan lebar 130 kaki. Kapal-kapal tersebut membawa SPY-6 Air dan *Missile Defense Radar (AMDR)* yang berfungsi sebagai radar pada kapal yang selalu memancar di Laut yang berpotensi menjadi wilayah konflik. Selain mengembangkan kapal untuk menangkal rudal, Jepang telah mengembangkan sistem keamanan siber mereka dengan menghabiskan 7 Miliar dolar AS untuk menghadapi serangan siber China, dengan mendirikan unit siber berjumlah 20.000 orang. Jepang mengembangkan kapal ini untuk menghadapi kemungkinan serangan China terhadap Taiwan, serangan yang mengancam pulau-pulau terdekat Jepang, dan serangan yang mengganggu pasokan semikonduktor di kawasan (PAB Indonesia, 2023).

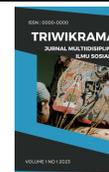
Dari kasus Jepang tersebut, wilayah Laut China Timur telah menjadi sebuah kawasan yang berpotensi menimbulkan rivalitas antara blok China dan sekutu Amerika Serikat. Perkembangan dinamika ini dapat menciptakan situasi kompleks dan meningkatkan ketegangan regional. Respon yang ditunjukkan oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat di Asia Timur terhadap kebijakan *Military Civil Fusion* ini dapat memperparah ketegangan dan menambah kompleksitas dalam stabilitas kawasan.

4. Implikasi yang Dihadirkan *Military Civil Fusion* Terhadap Stabilitas Regional

Penerapan kebijakan *Military Civil Fusion* oleh China telah membawa stabilitas kawasan Asia Timur ke arah yang lebih kompleks. Kebijakan yang memberikan peningkatan terhadap militer China ini menimbulkan kekhawatiran di negara-negara tetangga mengenai potensi perubahan *status quo* secara sepihak. Kebijakan ini meningkatkan resiko konflik terbuka di wilayah-wilayah sengketa seperti Laut China Timur dan Laut China Selatan. Hegemoni China dalam mengembangkan teknologi militer yang canggih dapat memperbesar resiko eskalasi militer apabila tidak diimbangi dengan pendekatan yang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Mackinder, yang menjelaskan bahwa pergeseran distribusi kekuasaan regional dapat berdampak pada keseimbangan dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola secara lanjut (Mackinder, 1900). Penerapan yang mendorong hegemoni ini membuat negara-negara di Asia Timur semakin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat sebagai upaya mengimbangi kekuatan China. Dari pembentukan aliansi pertahanan tersebut, dapat membuat ruang dialog antar negara menjadi lebih sempit dan lebih meningkatkan potensi konflik. Imbas dari penerapan kebijakan ini, dapat mendorong percepatan modernisasi militer di negara-negara Asia Timur. Sehingga, perlombaan senjata atau *arms race* dapat terjadi akibat meningkatnya kekhawatiran akan dominasi kekuasaan dan memicu ketegangan hingga menjadi konflik bersenjata.

Tidak hanya berpotensi memberikan dampak besar kepada stabilitas kawasan, kebijakan ini dapat menimbulkan dilema bagi mitra dagang China. Negara-negara tersebut khawatir dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan teknologi sipil untuk tujuan militer. Hal ini terjadi akibat diungkapnya eksploitasi teknologi sipil oleh China demi tujuan spionase dan sabotase di beberapa negara. Seperti pada tahun 2018, peretas yang berafiliasi dengan China meretas sistem kontraktor pertahanan Angkatan Laut Amerika Serikat dan berhasil mencuri data mengenai program rudal dan perang bawah laut. Selain itu, pada tahun 2021, penyidik menetapkan Huawei, yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di China, akibat telah mengirimkan data sensitif ke server di China dalam lima tahun terakhir dari sistem pengawas yang dipasang pada kantor pusat Uni Afrika (*Indo-Pasific Defence Forum*, 2025).

Dampak dari kebijakan yang ditimbulkan oleh *Military Civil Fusion* ini tidak hanya berdampak ke isu militer, tetapi juga dapat berimbas terhadap kebijakan yang akan diambil suatu negara dalam menghadapi kebijakan ini. Negara-negara di Asia Timur perlu memperkuat langkah pencegahan dengan membangun mekanisme komunikasi militer yang transparan. Dengan mengembangkan dialog terbuka antara negara-negara yang terlibat, dapat membantu mengurangi potensi salah kaprah dan eskalasi konflik yang tidak diinginkan. Negara-negara kawasan perlu mendorong penguatan penerapan peraturan internasional mengenai *dual-use* teknologi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang agresif. Dengan demikian, keinginan untuk menjaga dan menciptakan stabilitas di kawasan tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kerjasama multilateral, penguatan diplomasi, dan regulasi teknologi yang adil. Pendekatan ini menjadi solusi yang dapat membantu menghadapi dampak yang ditimbulkan *Military Civil Fusion* di kawasan.



KESIMPULAN

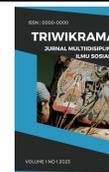
Kebijakan *Military Civil Fusion* yang diterapkan oleh China memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Timur. Secara umum, strategi ini menunjukkan upaya China untuk memodernisasi militer melalui integrasi dengan sektor sipil, yang berpotensi meningkatkan alutsista serta inovasi teknologi militernya. Meski demikian, implementasi *Military Civil Fusion* juga menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian di kawasan, khususnya terkait potensi perlombaan senjata atau *arms race* dan penggunaan agresif teknologi militer yang dapat memperburuk ketidakstabilan regional. Dengan analisis menggunakan teori Halford J. Mackinder yakni *Heartland* yang menegaskan bahwa negara yang berusaha memperkuat kekuatan militernya melalui modernisasi secara cepat cenderung bersiap untuk mengubah *landscape* kekuatan regional dan global, yang dapat menimbulkan ketegangan serta konflik.

Secara umum, inti dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa *Military Civil Fusion* merupakan strategi yang tidak hanya berorientasi pada kekuatan militer, tetapi juga berimplikasi pada dinamika politik dan keamanan kawasan Asia Timur. Analisis menunjukkan bahwa, meskipun China mengklaim bahwa *Military Civil Fusion* bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, implementasinya secara praktis menimbulkan ketidakpastian strategis yang harus diwaspadai oleh negara-negara tetangga. Analisis ini memperkuat pentingnya pendekatan keamanan kolektif dan diplomasi regional dalam mengatasi resiko-resiko yang muncul akibat kebijakan yang dilakukan China. Oleh karena itu, kebutuhan akan kerjasama keamanan yang bersifat multilateral menjadi semakin mendesak agar menjaga stabilitas dan mencegah munculnya konflik yang dapat mengancam stabilitas.

Kebijakan ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan yang secara historis sudah penuh dengan ketegangan militer dan politik. Selain itu, kekuatan inovasi militer yang dihasilkan dari *Military Civil Fusion* tidak hanya menguntungkan China, tetapi juga dapat memperluas ketidakpastian dan risiko konflik jika tidak diimbangi dengan aturan dan kerangka kebijakan di negara-negara kawasan Asia Timur yang efektif. Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya pengawasan internasional dan mendorong penguatan penerapan peraturan internasional yang mampu mengatur dampak ekonomi dan militer dari kebijakan tersebut guna menjamin stabilitas regional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2003). "Seeking security in the dragon's shadow: China and Southeast Asia in the emerging Asian order". Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, no.44, 1-27.
- Bratford, W. (2022, 1 April). "How Military-Civil Fusion Steps Up China's Semiconductor Industry". Diakses pada 24 Mei 2025, dari <https://digichina.stanford.edu/work/how-military-civil-fusion-helps-chinas-semiconductor-industry-step-up/>
- Chansoria, M. (2012). "Defying borders in future conflict in East Asia: Chinese capabilities in the realm of information warfare and cyber space". *The Journal of East Asian Affairs*, 105-127.
- Farrow, A. E. (2023). "Modernization and the Military-Civil Fusion Strategy". *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 6(6).
- Dwipratama, P. G. (2023, 14 April). "Dual-Use Aspek Militer dan Sipil Sebagai Upaya Penguatan Pertahanan dan Ekonomi Menggunakan Strategi Military-Civil Fusion (MCF)". Diakses pada 11 Juni 2025, dari <https://www.kemhan.go.id/poathan/2023/04/14/naskah-karya-tulis-ilmiah-esai-sishankamrata-dual-use-aspek-militer-dan-sipil-sebagai-upaya-penguatan-pertahanan-dan-ekonomi-menggunakan-strategi-military-civil-fusion-mcf.html>
- Garafola, C. L., Heath, T. R., Curriden, C., Smith, M. L., Grossman, D., Chandler, N., & Watts, S. (2022). "The People's Liberation Army's Search for Overseas Basing and Access".



- Goldsmith, B. E. (2014). "The East Asian peace as a second-order diffusion effect". *International Studies Review*, 16(2), 275-289.
- Greg, L. (2021, 30 Juni). "Commercialized Militarization China's Military-Civil Fusion Strategy". Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://www.nbr.org/publication/commercialized-militarization-chinas-military-civil-fusion-strategy/>
- Indo-Pasific Defense Forum. (2025, 28 April). "Persaingan Teknologi Maritim". Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://ipdefenseforum.com/id/2025/04/persaingan-teknologi-maritim/>
- Kamil, D. J. (2024). "IMPLIKASI PENINGKATAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TIONGGOK TERHADAP KEAMANAN INDONESIA TAHUN 2021-2023". *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1).
- Kania, E. B., & Laskai, L. (2021). *Myths and realities of China's military-civil fusion strategy*. Washington, DC: Center for a New American Security.
- Knutsen, T. L. (2014). "Halford J. Mackinder, geopolitics, and the heartland thesis". *The International History Review*, 36(5), 835-857.
- Lafferty, B., Shraberg, A., & Clemens, M. (2013). "China's civil-military integration". *SITC Research Briefs*, 2013(2013-10).
- Mackinder, H. J. (1942). "The round world and the winning of the peace". *Foreign Aff.*, 21, 595.
- Mercy A. K. (2023, 21 Agustus). "Military-Civil Fusion: China, the US, and Beyond". Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://thedi diplomat.com/2023/08/military-civil-fusion-china-the-us-and-beyond/>
- Muhaimin. (2025, 8 Januari). "Jepang Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Militer China yang Semakin Agresif". Diakses pada 13 Juni 2025, dari <https://international.sindonews.com/read/1513631/40/jepang-tingkatkan-kewaspadaan-terhadap-militer-china-yang-semakin-agresif-1736305265/20>.
- Nurhaliza, N. "Respon Pemerintah China Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Taiwan Periode 2017-2020". Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- PAB Indonesia. (2023, 30 Agustus). "Jepang akan Imbangi Kekuatan Militer China". Diakses pada 5 Juni 2025, dari <https://pab-indonesia.co.id/news/detail/23884/jepang-akan-imbangi-kekuatan-militer-china>
- Rahayo, A., & Puspapertiwi, S. (2018). "EAST ASIA REGIONAL LEADERSHIP DYNAMIC IN MEGA-REGIONAL AGREEMENT ERA (Dinamika Kepemimpinan Regional Asia Timur Dalam Era Perjanjian Mega-Regional)". *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 9(1), 39-58.
- Stone, A., & Wood, P. (2020). *China's Military-Civil Fusion Strategy*. Alabama: China Aerospace Studies Institute.
- The New Voice Of Ukraine. (2024, 8 Mei). "China preps Navy for Taiwan invasion - The Telegraph". Diakses pada 14 Juni 2025, dari <https://english.nv.ua/nation/china-is-preparing-huge-armada-of-civilian-vessels-to-invade-taiwan-50422371.html>
- Heath, T. R. (2017). *Chinese political and military thinking regarding Taiwan and East and South China Seas*. RAND Corporation.